

**DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI DI SEKTOR AGROINDUSTRI TERHADAP
DISTRIBUSI PENDAPATAN SEKTORAL, TENAGA KERJA DAN
RUMAHTANGGA DI INDONESIA:
ANALISIS SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI
(The Impact of Economic Policy in Agroindustry Sector on Sectoral, Labor and
Household Income Distribution in Indonesia: A Social Accounting Matrix Analysis)**

BONAR M. SINAGA¹ dan SRI HERY SUSILOWATI²

¹Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

²Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian

ABSTRACT

The research objective is to analyze the impact of government expenditure, export, investment and tax policy in agroindustry sector on sectoral, labor and household income distribution. The analysis using Social Accounting Matrix (SAM) model. Result of policy simulation in agroindustry sector is used for further analysis of income distribution using SAM and SUSENAS data. The result show that export, investment and tax incentive policy in agroindustry sector has positive impact to improve sectoral, labor and household income distribution. Export and investment policy in food agroindustry give a greater impact on income distribution compare to non food agroindustry. The most effective policy to improve income distribution is to increase investment in priority industries of agroindustry.

Key word: Agroindustry, Social Accounting Matrix, Policy Impact, Income Distribution

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak berbagai kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap distribusi pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumahtangga. Kebijakan ekonomi yang dimaksud adalah kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah, ekspor, investasi dan insentif pajak. Analisis menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Simulasi kebijakan di sektor agroindustri dilanjutkan untuk menganalisis distribusi pendapatan menggunakan data SNSE dan SUSENAS. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ekspor, investasi dan insentif pajak di sektor agroindustri berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumahtangga. Kebijakan ekspor dan investasi di sektor agroindustri makanan berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan lebih besar dibandingkan kebijakan di sektor agroindustri non makanan. Kebijakan ekonomi yang paling efektif menurunkan kesenjangan pendapatan adalah meningkatkan investasi di sektor agroindustri prioritas.

Kata kunci Agroindustri, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, Dampak Kebijakan, Distribusi Pendapatan

1) Ketua Program Magister dan Doktor PS. Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

I. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian Indonesia pada Pelita IV dan seterusnya yang direncanakan memprioritaskan pembangunan sektor industri dan jasa yang mendukung sektor pertanian, pada kenyataannya hanya merupakan slogan. Yang terjadi adalah strategi pembangunan dilakukan dengan mengandalkan sektor industri yang berbasis ekspor melalui investasi besar-besaran untuk mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya

Strategi pembangunan nasional dengan menitikberatkan pada sektor industri dan jasa tersebut dari sisi pertumbuhan ekonomi dinilai cukup berhasil sehingga sampai sebelum masa krisis, pertumbuhan ekonomi mampu mencapai rata-rata diatas 7 % per tahun. Namun tujuan pembangunan yang berlandaskan Trilogi Pembangunan bukanlah pencapaian pertumbuhan atau peningkatan pendapatan semata, melainkan pembangunan yang berdasarkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga landasan tersebut merupakan strategi yang dapat menjamin kontinuitas pembangunan dimasa datang.

Pada kenyataannya strategi pembangunan yang menekankan pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi tersebut menghasilkan kesenjangan sektoral dan pendapatan masyarakat yang cukup parah. Pangsa sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional telah turun drastis dari sekitar 47.6 % pada tahun 1970 menjadi hanya 13.4 % pada tahun 2005. Sebaliknya pangsa sektor industri meningkat mencapai 83.7 % pada tahun yang sama. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pun mengalami serupa. Selama periode 1982 - 2005 penyerapan tenaga kerja sektor pertanian secara konsisten terus mengalami penurunan, yaitu dari 54.7 % menjadi 19.8 % (BPS, 2006). Angka-angka tersebut secara jelas menunjukkan bahwa telah terjadi kesenjangan produktivitas antara sektor pertanian dan non pertanian, dimana arah perubahan struktur ekonomi cenderung tidak menguntungkan sektor pertanian. Kesenjangan pendapatan masyarakat ternyata juga semakin melebar. Apabila pada tahun 1985 perbandingan pendapatan per kapita buruh tani dibandingkan rumahtangga bukan pertanian golongan atas di kota sebesar 1: 3.66 maka pada saat krisis ekonomi tahun 1998 menjadi 1: 9.53 (BPS, 1998).

Keberhasilan pembangunan industri tersebut juga menghasilkan perekonomian yang sangat rapuh, tidak efisien dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi tahun 1977, defisit anggaran meningkat secara tajam pada tahun 1999 mencapai hampir Rp 50 trilliun atau hampir 4 % dari PDB dan hutang pemerintah sebesar US \$150 096 juta atau sekitar 113 % terhadap PDB (OECD, 2000). Strategi industrialisasi yang dilakukan tidak mampu mengatasi permasalahan ekonomi nasional. Kehancuran ekonomi tersebut merupakan kesalahan kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pada

industrialisasi yang berbasis ekspor yang padat investasi, menggunakan bahan baku dan modal impor dan tidak terkait dengan sektor pertanian sebagai sumberdaya utama nasional.

Seandainya kebijakan industri diarahkan pada industri pertanian atau agroindustri, diyakini akan dapat membangkitkan sektor ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi tersebut akan ditransmisikan ke seluruh sektor perekonomian dan hal ini akan menjadi pendorong terbentuknya pertumbuhan perekonomian nasional yang cepat dan merata. Pengembangan sektor agroindustri juga dapat dipandang sebagai transmisi yang paling tepat dalam menjembatani proses transformasi ekonomi di Indonesia dari sektor pertanian ke sektor industri. Dengan demikian peran sektor pertanian dalam PDB tidak dilihat dari produk primer yang dihasilkan saja, melainkan harus dikaitkan dengan industri pengolahan yang diciptakan dan perannya dalam menarik dan mendorong pembangunan khususnya di perdesaan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak berbagai kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap distribusi pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumahtangga. Kebijakan ekonomi yang dimaksud adalah kebijakan pengeluaran pemerintah, ekspor, investasi dan insentif pajak di sektor agroindustri.

II. METODOLOGI

2.1. Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan utama (*neccesery condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Namun dengan hanya memacu pertumbuhan ekonomi saja bukanlah persyaratan yang cukup (*sufficient condition*) untuk mengatasi masalah kemiskinan karena akan memunculkan *trade off* terhadap pemerataan yang cenderung buruk. Pertumbuhan ekonomi akan kehilangan makna bagi golongan miskin apabila dibarengi dengan meningkatnya ketidakmerataan. Atau dengan kata lain jika manfaat dari pertumbuhan tersebut lebih banyak mengarah pada golongan kaya dan keadaan golongan miskin tidak bertambah baik atau bahkan cenderung lebih buruk.

Konsep distribusi pendapatan dapat dibedakan menurut dua aliran ekonomi. **Pertama, Mahzab Klasik (*Orthodox*)** yang berpegang pada konsep keseimbangan alokasi sumberdaya dan konsep pasar bebas. Perbedaan kondisi antar sektor akan menyebabkan pertukaran dan alokasi sumberdaya secara efisien tanpa ada campur tangan pemerintah (konsep pasar bebas) hingga mencapai kondisi *pareto optimal*. Pertukaran tersebut pada hakekatnya merupakan proses pembangunan. Proses pembangunan berawal dari pengembangan kapasitas produksi melalui peningkatan stok modal dan adanya spesialisasi (Herrick dan Kindleberger, 1988;

Arndt, 1987; Gillis *et al.*, 1987; Djojohadikusumo, 1994 dan Deliarnov, 1995). Selanjutnya Lewis (1954) membahas aspek distribusi pendapatan dengan penekanan pada masalah pembagian hasil produksi antara pemilik modal dan pemilik tanah dimana ketidakmerataan pendapatan akan muncul pada awalnya dan akan menghilang setelah dicapai hasil pembangunan.

Teori diatas konsisten dengan konsep pemikiran Kuznets (1955) yang dituangkan dalam bentuk kurva U terbalik, yaitu sewaktu pendapatan per kapita naik, ketidakmerataan mulai muncul dan mencapai maksimum pada saat pendapatan berada pada tingkat menengah dan kemudian menurun sewaktu telah dicapai tingkat pendapatan yang sama dengan karakteristik negara industri. Peningkatan pertumbuhan dimungkinkan dengan berkembangnya sektor pemimpin (*leading sector*). Ketidakmerataan pendapatan akan memburuk pada tahap awal disebabkan upah buruh masih relatif rendah. Dengan demikian pertumbuhan tidak banyak memberikan manfaat bagi golongan miskin atau golongan buruh. Namun dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita, maka permintaan terhadap sarana publik (transportasi, komunikasi, pendidikan dsb) juga meningkat. Kondisi ini akan memunculkan *trickle-down effect* bagi golongan miskin dengan meningkatnya upah buruh melalui sektor lain. (Gillis *et al.*, 1987; Todaro, 2000). Menurut Hogendorn (1992) fenomena kurva Kuznets tersebut dapat dilihat pada masyarakat, dimana distribusi pendapatan yang merata pada awalnya dijumpai di sektor pertanian. Namun begitu sebagian masyarakat berpindah ke sektor industri yang memiliki upah lebih tinggi, maka ketidakmerataan pendapatan masyarakat segera muncul

Kedua, Mahzab Strukturalis yang memandang pembangunan ekonomi sebagai transisi yang ditandai oleh suatu transformasi yang mengandung perubahan mendasar pada ekonomi yang disebut sebagai perubahan struktural. Perubahan struktural tersebut merupakan masa ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan kesenjangan penyesuaian yang panjang (Arndt, 1987; Gillis *et al.*, 1987; Herrick dan Kindleberger, 1988; Djojohadikusumo, 1994). Berbeda dengan aliran Klasik yang percaya bahwa pemerataan pendapatan akan terjadi dengan sendirinya dengan meningkatnya pendapatan per kapita, aliran Strukturalis menganggap bahwa masalah distribusi pendapatan dan pemerataan harus dilakukan melalui intervensi pemerintah. Dalam hal ini terdapat dua pendekatan ekstrim dalam mencapai pertumbuhan dan pemerataan, yaitu Aliran Ekstrim (Radikal) Kanan atau aliran yang menganut faham kapitalis yang memfokuskan pada pertumbuhan (*“grow first, then redistribute”*) dan Aliran Ekstrim Kiri atau aliran yang menganut faham Sosialis, yang memfokuskan pada masalah pemerataan (*“redistribute first, then grow”*). Sebagai alternatif dari dua aliran ekstrim tersebut, terdapat satu strategi yang beraliran moderat untuk mencapai

pertumbuhan dan pemerataan secara bersama, yaitu redistribusi dengan pertumbuhan (“*redistribution with growth /RWG*”), yang dikembangkan oleh Bank Dunia (Chenery *et al.*, 1987)

Sasaran pembangunan ekonomi bagi aliran ekstrim kanan bukan mengarah pada pemerataan yang lebih besar melalui mekanisme *trickle-down*, tetapi melalui pemusatan pendapatan pada masyarakat yang telah kaya. Produksi diatur secara efisien, kemudian baru didistribusi untuk memperoleh distribusi pendapatan yang diinginkan melalui transfer atau pajak yang diyakini tidak akan mendistorsi ekonomi. Namun aliran ini telah gagal. Contoh empiris kegagalan ini adalah kebijakan pembangunan ekonomi di Brazil, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat sangat cepat namun disertai dengan tingkat ketidakmerataan sangat tinggi dan perkembangan pengurangan tingkat kemiskinan yang sangat lambat. Pemilikan aset sangat terkonsentrasi, akses terhadap pendidikan sangat tidak merata, pembangunan industri maupun pertanian diutamakan pada skala usaha besar dan teknologi padat kapital.

Sebaliknya aliran Ekstrim Kiri memiliki kebijakan “*redistribute first, then grow*”. Pemerintah mengambil alih pemilik modal dan pemilik tanah dengan membagikan aset mereka ke produsen skala kecil, yang seringkali melalui sistem pemilikan bersama. Kebijakan tersebut membawa dua dampak terhadap distribusi pendapatan. Pertama, dampak secara langsung, yaitu tingkat pemerataan pendapatan akan segera meningkat secara nyata. Kedua adalah dampak dalam jangka panjang. Apabila usaha-usaha berskala lebih kecil dan melalui pemilikan bersama tersebut dapat menghasilkan keuntungan besar dan dikelola secara efisien dan produktif, maka efek redistribusi tersebut akan meningkat. Namun apabila tidak dikelola secara produktif, pemilik awal akan kehilangan aset mereka dan pemilik baru tidak akan memperoleh manfaat secara proporsional. Negara yang termasuk dalam aliran ini adalah negara-negara Uni Soviet dan RRC. Kebijakan pembangunan berbasis industri yang dilakukan Uni Soviet adalah mengambil alih kekayaan yang seharusnya menjadi hak masyarakat secara umum terutama petani dan menekan konsumsi yang hasilnya diinvestasikan kembali ke sektor produktif. Dengan kebijakan tersebut ketidakmerataan pendapatan masyarakat memang mengecil karena hasil pendapatan diambil oleh pemerintah.

Strategi mencapai pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dewasa ini mengalami pergeseran paradigma, karena dua aliran ekstrim yang telah diuraikan di atas kurang disukai. Konsep dikembangkan oleh World Bank, dinamakan redistribusi dengan pertumbuhan atau “*redistribution with growth/ RWG*” (Chenery *et al.*, 1974) dipandang lebih cocok diterapkan di negara-negara berkembang. Hanya melalui peningkatan GNP akan ada sesuatu yang berarti untuk bisa didistribusikan. Distribusi tidak dapat diharapkan sebagai produk

sampingan dari pertumbuhan melainkan harus diciptakan dari unsur kebijakan. Ide dasar dari RWG adalah kebijakan pemerintah harus mempengaruhi pola pembangunan sedemikian rupa sehingga produsen berpendapatan rendah (yang pada umumnya berlokasi terutama di sektor pertanian dan industri pedesaan berskala kecil) akan melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan.

2.2. Metode Analisis

2.2.1. Jenis dan Sumber Data

Data utama yang digunakan adalah data SNSE (Sistem Neraca Sosial Ekonomi) atau disebut juga SAM (*Social Accounting Matrix*) dan data SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional). Neraca SNSE yang digunakan adalah neraca tahun 2003, merupakan updating dari neraca tahun 2002 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain menggunakan dua data utama tersebut, untuk melakukan disagregasi sektor industri ke dalam sektor agroindustri dan industri lainnya, digunakan data-data pendukung diantaranya tabel Input-Output Indonesia, Statistik Industri serta data-data lain yang relevan. Sebagian besar data bersumber dari BPS.

2.2.2. Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Kerangka SNSE agroindustri dibangun dengan melakukan pengelompokan sektor industri ke dalam empat kelompok, yaitu agroindustri makanan, agroindustri non makanan, industri ringan dan industri berat. Sektor agroindustri selanjutnya didisagregasi menjadi: (1) agroindustri makanan, minuman dan rokok, dan (2) agroindustri non makanan. Agroindustri makanan dan minuman didisagregasi lagi menjadi: (1) agroindustri peternakan, (2) agroindustri tanaman pangan, (3) agroindustri perikanan, (4) agroindustri perkebunan, (5) industri minuman, dan (5) industri rokok. Sedangkan agroindustri non makanan didisagregasi ke dalam: (1) industri kapuk, (2) industri kulit samakan dan olahan, (3) industri kayu lapis, barang dari kayu, bambu dan rotan, (4) industri bubur kertas, dan (5) industri karet remah dan asap. Sektor pertanian primer terdiri dari subsektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertanian tanaman lainnya. Sedangkan sektor produksi lainnya mengacu pada klasifikasi neraca SNSE oleh BPS. Dengan perlakuan disagregasi tersebut, sektor produksi seluruhnya berjumlah 28 sektor.

Neraca rumahtangga didisagregasi ke dalam dua versi. Pertama, neraca rumahtangga didisagregasi ke dalam dua golongan rumahtangga berdasarkan wilayah yaitu: (1) rumahtangga di desa, dan (2) rumahtangga di kota. Kedua, berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu; (1) rumahtangga pertanian, dan (2) rumahtangga non pertanian. Selain itu untuk menentukan industri yang dijadikan prioritas pengembangan sektor agroindustri, neraca

rumahtangga juga didisagregasi ke dalam 6 golongan rumahtangga, yaitu: (1) buruh tani, (2) petani, (3) non pertanian golongan rendah di desa, (4) non pertanian golongan atas di desa, (5) non pertanian golongan rendah di kota, dan (6) non pertanian golongan atas di kota. Sedangkan klasifikasi neraca tenaga kerja adalah: (1) tenaga kerja pertanian di desa, (2) tenaga kerja pertanian di kota, (3) tenaga kerja non pertanian di desa, dan (4) tenaga kerja non pertanian di kota.

Perlakuan disagregasi tersebut mengakibatkan neraca SNSE menjadi tidak seimbang. Untuk memenuhi syarat keseimbangan neraca digunakan metode *Cross Entrophy* (Robinson and El-Said, 1997) dengan menggunakan program GAMS 2.50. Sedangkan analisis model SNSE menggunakan program MATS (*Matrix Accounts Transformation System*).

Analisis utama dalam model SNSE adalah analisis pengganda yang dapat dinyatakan dalam persamaan matriks sebagai berikut.

$$T = M_a X \dots\dots\dots (1)$$

dimana $M_a = (I - A)^{-1}$ disebut sebagai matriks pengganda neraca (*accounting multiplier*) dan $(I - A)^{-1}$ disebut sebagai matriks kebalikan Leontief. Model tersebut menjelaskan bahwa pendapatan neraca endogen (yaitu neraca faktor produksi, neraca institusi dan neraca sektor produksi) yang dinyatakan dalam notasi T, akan berubah sebesar M_a unit akibat adanya perubahan neraca eksogen, dinyatakan dalam notasi X sebesar satu unit. Besarnya M_a ditentukan oleh besaran koefisien *multiplier* pada matriks $(I - A)^{-1}$.

2.2.3. Analisis Skenario Kebijakan

Ada 11 skenario kebijakan yang dianalisis dengan model SNSE, yaitu: (1) peningkatan anggaran pengeluaran pembangunan pemerintah di sektor agroindustri dan pertanian primer, (2) peningkatan ekspor agroindustri, (3) peningkatan investasi di sektor agroindustri, dan (4) pemberian insentif pajak di sektor agroindustri. Secara rinci skenario kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

Skenario 1: Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor agroindustri sebesar 10 % yang dialokasikan ke **industri makanan** dan didistribusikan secara merata ke masing-masing industri.

Skenario 2: Peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor agroindustri sebesar 10 % yang dialokasikan ke **industri non makanan** dan didistribusikan secara merata ke masing-masing industri

Skenario 3: Peningkatan ekspor di sektor agroindustri sebesar 7 % untuk masing-masing **industri makanan**.

Skenario 4: Peningkatan ekspor di sektor agroindustri sebesar 7 % untuk masing masing **industri non makanan**.

Skenario 5: Kombinasi peningkatan ekspor di sektor agroindustri sebesar 7 % untuk masing-masing industri makanan (skenario 3) dan peningkatan pengeluaran

pemerintah 10 % di sektor pertanian primer yang dialokasikan ke masing-masing subsektor secara merata.

- Skenario 6:** Kombinasi peningkatan ekspor di sektor agroindustri sebesar 7 % untuk masing-masing industri non makanan (skenario 4) dan peningkatan pengeluaran pemerintah 10% di sektor pertanian primer yang dialokasikan ke masing-masing subsektor secara merata.
- Skenario 7:** Peningkatan investasi di sektor agroindustri sebesar 10 % yang didistribusikan secara proporsional ke masing-masing **industri makanan**
- Skenario 8:** Peningkatan investasi di sektor agroindustri sebesar 10 % yang didistribusikan secara proporsional ke masing-masing **industri non makanan**.
- Skenario 9:** Peningkatan investasi di sektor agroindustri sebesar 10 % yang didistribusikan secara merata ke industri **prioritas**.
- Skenario 10:** Kombinasi peningkatan investasi di sektor agroindustri sebesar 10 % yang didistribusikan secara merata ke industri **prioritas** (skenario 9) dan peningkatan pengeluaran pemerintah 10% di sektor pertanian primer yang dialokasikan ke masing-masing subsektor secara merata.
- Skenario 11:** Pemberian insentif pajak ke sektor agroindustri makanan dan non makanan sebesar 10 %.

Hasil analisis dampak masing-masing skenario kebijakan tersebut selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis distribusi pendapatan rumahtangga dengan menggunakan data SUSENAS. Sedangkan analisis distribusi pendapatan sektoral dan tenaga kerja menggunakan data SNSE.

Alasan meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan agroindustri sebesar 10 % adalah berdasarkan pada angka pertumbuhan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian tahun 2003 ke tahun 2004 sebesar 13 %. Sedangkan pada periode yang sama pengeluaran pemerintah di sektor industri justru mengalami pertumbuhan yang menurun. Oleh karena itu besaran peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian primer dan agroindustri menggunakan angka pertumbuhan yang moderat yaitu sebesar 10 %. Sedangkan peningkatan ekspor sebesar 7 % didasarkan pada target pertumbuhan ekspor agroindustri sebesar 7 % (Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, 2005).

Penentuan **industri prioritas** pada Skenario 9 dan Skenario 10 adalah berdasarkan urutan atau *ranking* nilai pengganda output, tenaga kerja, keterkaitan sektor dan pendapatan rumahtangga. Industri yang memiliki urutan tertinggi dianggap sebagai industri prioritas untuk dikembangkan. Kriteria yang digunakan untuk melakukan ranking adalah, pertama berdasarkan pengganda yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pengganda output, tenaga kerja, dan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan sektor lain. Kedua, berdasarkan pengganda pendapatan rumahtangga golongan rendah, yaitu rumahtangga buruh tani, petani kecil dan rumahtangga non pertanian golongan rendah di desa maupun di kota. Dengan menggunakan dua kriteria tersebut, industri yang berada pada urutan teratas

diharapkan memenuhi kriteria “*pro growth, pro poor and pro employment*” yaitu industri yang dapat memacu pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan memberikan manfaat yang besar kepada golongan rendah sehingga akan mengurangi kesenjangan pendapatan rumahtangga.

Alasan mengkombinasikan skenario peningkatan ekspor dengan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian primer karena dengan memperluas pasar dan didukung dengan penyediaan bahan baku agroindustri yang lebih baik, diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan sektor agroindustri yang lebih besar yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan tenaga kerja dan rumahtangga. Lebih lanjut hal ini akan berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan rumahtangga desa vs kota dan rumahtangga pertanian vs non pertanian, mengingat dari hasil penelitian sebelumnya, sektor pertanian primer menghasilkan pengganda pendapatan paling besar bagi golongan rumahtangga buruh tani dan petani kecil yang semuanya berada di wilayah pedesaan¹

2.2.4. Analisis Distribusi Pendapatan Sektoral, Tenaga Kerja dan Rumahtangga

Hasil analisis dampak kebijakan dari model SNSE digunakan untuk melakukan analisis distribusi pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumahtangga menggunakan analisis dekomposisi indeks Theil (Akita et al., 1999). Analisis distribusi Theil dapat dinyatakan dalam dua macam indeks yaitu berdasarkan pangsa pendapatan (T) dan berdasarkan pangsa populasi (L). Berbeda dengan indeks kesenjangan lain, indeks Theil dapat didekomposisi menjadi distribusi dalam (*within*) kelompok atau antar individu rumahtangga (T_w dan L_w) dan distribusi antar (*between*) kelompok (T_b dan L_b). Mengingat analisis ini mengelompokkan rumahtangga ke dalam dua golongan rumahtangga dan dampak kebijakan akan mempengaruhi perubahan pendapatan masing-masing golongan, maka indeks Theil sangat tepat digunakan untuk keperluan analisis ini. Indeks Theil dinyatakan dalam formula sebagai berikut.

$$T = \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) T_i + \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \log \left(\frac{Y_i / Y}{n_i / n} \right) = T_w + T_b \dots \dots \dots (2)$$

dan

$$L = \sum_i \left(\frac{n_i}{n} \right) L_i + \sum_i \left(\frac{n_i}{n} \right) \log \left(\frac{n_i / n}{Y_i / Y} \right) = L_w + L_b \dots \dots \dots (3)$$

¹ Susilowati et al., 2007. Peran Agroindustri dalam Perekonomian Indonesia: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Forum Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (*forthcoming*).

dimana

$$T_i = \sum_j \left(\frac{Y_{ij}}{Y_i} \right) \log \left(\frac{Y_{ij}/Y_i}{n_{ij}/n_i} \right) \dots\dots\dots(4)$$

$$L_i = \sum_j \left(\frac{n_{ij}}{n_i} \right) \log \left(\frac{n_{ij}/n_i}{Y_{ij}/Y_i} \right) \dots\dots\dots(5)$$

Y_i adalah total pendapatan rumahtangga dalam kelompok i , dan n_i adalah jumlah total rumahtangga dalam kelompok i ($= \sum_j n_{ij}$). Karena keterbatasan data, analisis dampak

kebijakan di sektor agroindustri terhadap distribusi output sektoral dan pendapatan tenaga kerja hanya dilakukan untuk indeks Theil Total, baik untuk indeks Theil-T maupun indeks Theil-L dimana indeks tersebut mencerminkan distribusi output antar sektor maupun distribusi pendapatan antar golongan tenaga kerja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penentuan Industri Prioritas di Sektor Agroindustri

Dari hasil analisi pengganda SNSE, dapat diketahui nilai pengganda output, tenaga kerja, keterkaitan antar sektor dan pendapatan rumahtangga di masing-masing agroindustri makanan dan non makanan. Nilai dan ranking pengganda output, tenaga kerja dan keterkaitan sektor disajikan pada Tabel 1. Hasil ranking nilai pengganda output menunjukkan industri yang berada di urutan lima teratas berturut-turut adalah industri kayu lapis, bambu dan rotan, industri kertas, karet, kulit dan kapuk Industri-industri tersebut sekaligus juga berada di urutan teratas berdasarkan pengganda keterkaitan antar sektor. Sedangkan industri yang berada di lima urutan teratas berdasarkan nilai pengganda tenaga kerja adalah industri rokok, karet, minuman, industri makanan sektor tanaman pangan dan industri kayu.

Tabel 1. Nilai dan Ranking Pengganda Output, Tenaga Kerja dan Keterkaitan Sektor Tahun 2003

No	Agroindustri	Output		Tenaga kerja		Keterkaitan Sektor	
		Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank
1	Makanan sektor peternakan	6.0918	10	1.5257	7	5.0498	10
2	Makanan sektor tan pangan	6.2386	8	1.5835	4	5.1026	9
3	Makanan sektor perikanan	6.3377	7	1.5465	6	5.2529	7
4	Makanan sektor perkebunan	5.9582	11	1.4591	8	4.3553	11
5	Minuman	6.2189	9	1.6670	3	5.1949	8
6	Rokok	6.3445	6	1.8482	1	5.3214	6
7	Kapuk	6.5743	5	1.4438	9	5.5735	5
8	Kulit samakan, olahan	6.6569	4	1.4201	10	5.6498	3
9	Kayu lapis, barang dr kayu, bambu dan rotan	7.0163	1	1.5563	5	5.8904	1
10	Bubur kertas	6.7762	2	1.4085	11	5.7233	2
11	Karet remah dan karet asap	6.6678	3	1.8459	2	5.5996	4

Catatan: Nilai ranking terkecil menunjukkan ranking teratas (nilai pengganda terbesar)

Dilihat dari kriteria pengganda pendapatan rumahtangga golongan rendah (Tabel 2), industri-industri yang berada di urutan lima teratas berturut-turut adalah industri karet, kayu, rokok, industri makanan dari sektor perikanan, minuman.

Tabel 2. Nilai dan Ranking Pengganda Pendapatan Rumahtangga Golongan Rendah Tahun 2003

No	AGROINDUSTRI	Buruh tani		Petani Kecil		Non tani gol rendah –desa		Non tani gol rendah-kota	
		Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank
1	Makanan sektor peternakan	0.1750	7	0.2182	4	0.4824	9	0.7390	10
2	Makanan sektor tan pangan	0.1810	5	0.2248	2	0.5015	5	0.7710	8
3	Makanan sektor perikanan	0.1829	1	0.2310	1	0.4955	6	0.7488	9
4	Makanan sektor perkebunan	0.1707	8	0.2145	5	0.4660	11	0.7082	11
5	Minuman	0.1811	4	0.2190	3	0.5191	4	0.8191	7
6	Rokok	0.1814	3	0.2041	6	0.5611	2	0.9407	3
7	Kapuk	0.1573	11	0.1740	11	0.4802	10	0.8361	6
8	Kulit samakan dan olahan	0.1637	9	0.1819	9	0.4935	7	0.8644	4
9	Kayu lapis, barang dari kayu, bambu dan rotan	0.1755	6	0.1938	8	0.5316	3	0.9426	2
10	Bubur kertas	0.1619	10	0.1800	10	0.4877	8	0.8558	5
11	Karet remah dan karet asap	0.1750	2	0.1968	7	0.5655	1	1.0503	1

Catatan: Nilai ranking terkecil menunjukkan ranking teratas (nilai pengganda terbesar)

Industri pengolahan makanan dari sektor perikanan memberikan kontribusi lebih besar terutama untuk peningkatan pendapatan rumahtangga buruh tani dan petani kecil. Sedangkan industri karet lebih banyak berperan meningkatkan pendapatan rumahtangga non pertanian golongan rendah baik di desa maupun di kota.

Dengan menggabungkan dua indikator di atas dan melakukan ranking akhir dapat diketahui agroindustri yang berada pada lima urutan teratas berturut-turut yaitu industri karet, kayu lapis bambu dan rotan, rokok, industri pengolahan makanan dari sektor perikanan dan industri minuman (Tabel 3). Dengan demikian berdasarkan kriteria pengganda output, tenaga kerja, keterkaitan sektor dan pendapatan rumahtangga golongan rendah, industri-industri tersebut merupakan industri yang apabila memperoleh prioritas pengembangan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan rumahtangga golongan rendah yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan memperbaiki kesenjangan pendapatan rumahtangga.

Tabel 3. Ranking Pengganda Output, Tenaga Kerja, Keterkaitan Sektor dan Pendapatan Rumahtangga Golongan Rendah Tahun 2003

No	AGROINDUSTRI	Output	TK	Keterkaitan Sektor	Pendap RT gol rendah	Total Nilai	Rank
1	Makanan sektor peternakan	10	7	10	8	35	10
2	Makanan sektor tan pangan	8	4	9	6	27	8
3	Makanan sektor perikanan	7	6	7	3	23	4
4	Makanan sektor perkebunan	11	8	11	10	40	11
5	Minuman	9	3	8	4	24	5
6	Rokok	6	1	6	2	15	3
7	Kapuk	5	9	5	11	30	9
8	Kulit samakan dan olahan	4	10	3	7	24	6
9	Kayu lapis, barang dari kayu, bambu dan rotan	1	5	1	5	12	2
10	Bubur kertas	2	11	2	9	24	7
11	Karet remah dan karet asap	3	2	4	1	10	1

Catatan: Nilai ranking terkecil menunjukkan ranking teratas (nilai pengganda terbesar)

3.2. Dampak Kebijakan di Sektor Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan Sektoral dan Tenaga kerja

Berdasarkan Indeks Theil-T, kesenjangan sektoral sebelum dilakukan simulasi sebesar 0.31002. Apabila distribusi output antar sektor tersebut dianalisis menggunakan metode indeks Gini, menghasilkan nilai 0.486 dimana besaran tersebut menurut Todaro (1987) termasuk ke dalam distribusi yang tidak merata. Sedangkan berdasarkan indeks Theil-L perubahan indeks kesenjangan output sektoral menghasilkan angka lebih besar dibandingkan indeks Theil-T namun menunjukkan pola perubahan yang sama.

Selanjutnya dari 11 Skenario kebijakan yang dilakukan, kebijakan yang berdampak paling besar dalam mengurangi kesenjangan output sektoral adalah kebijakan meningkatkan investasi di sektor agroindustri prioritas (Skenario 9) dan mengkombinasikan kebijakan tersebut dengan peningkatan pengeluaran pemerintah ke sektor pertanian primer (Skenario 10). Sedangkan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor agroindustri non makanan (Skenario 2) tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan kesenjangan output sektoral (Tabel 4).

Tabel 4. Dampak Kebijakan Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan Sektoral dan Tenaga Kerja Tahun 2003

SIMULASI ¹	SEKTORAL		TENAGA KERJA	
	Theil-T	Theil-L	Theil-T	Theil-L
DASAR²	0.31002	0.31020	0.04933	0.05396
Skenario 1	-0.00001	-0.00002	-0.00001	-0.00001
Skenario 2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Skenario 3	-0.00021	-0.00040	-0.00026	-0.00032
Skenario 4	-0.00002	0.00000	-0.00002	-0.00002
Skenario 5	-0.00031	-0.00053	-0.00033	-0.00040
Skenario 6	-0.00003	-0.00001	-0.00002	-0.00003
Skenario 7	-0.00026	-0.00047	-0.00030	-0.00037
Skenario 8	0.00019	0.00006	-0.00003	-0.00004
Skenario 9	-0.00078	-0.00077	-0.00028	-0.00034
Skenario 10	-0.00089	-0.00091	-0.00035	-0.00042
Skenario 11	-0.00014	-0.00028	-0.00018	-0.00022
Rata-rata	-0.00022	-0.00030	-0.00015	-0.00018

¹ Nilai indeks Theil masing-masing Skenario adalah nilai **perubahan** antara indeks simulasi Dasar dengan indeks simulasi masing-masing Skenario.

² Nilai indeks Theil sebelum dilakukan simulasi kebijakan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah, ekspor dan investasi yang ditujukan ke industri pengolahan makanan (Skenario 1, Skenario 3, Skenario 5 dan Skenario 7) dapat menurunkan kesenjangan output antar sektor lebih besar dibandingkan bila kebijakan tersebut dialokasikan ke agroindustri non makanan. Atau kebijakan ekonomi yang ditujukan ke sektor agroindustri non makanan menghasilkan dampak terhadap penurunan kesenjangan output sektoral yang lebih kecil. Bahkan kebijakan peningkatan investasi di sektor agroindustri non makanan (Skenario 8) justru akan meningkatkan kesenjangan sektoral. Dampak kebijakan pemberian insentif pajak kepada sektor agroindustri menghasilkan penurunan kesenjangan output sektoral yang lebih kecil dibandingkan kebijakan ekspor maupun investasi ke sektor agroindustri non makanan. Hal ini karena pengaruh kebijakan tersebut terhadap output sektoral bersifat tidak langsung, dimana pemberian insentif pajak diharapkan akan merangsang investor untuk meningkatkan investasi di sektor agroindustri dan dampak lebih lanjut akan meningkatkan output sektor agroindustri.

Indeks distribusi pendapatan tenaga kerja menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan distribusi output sektoral (Tabel 4). Artinya terjadi kesenjangan pendapatan antar tenaga kerja pertanian di desa, tenaga kerja pertanian di kota, tenaga kerja non pertanian di desa dan tenaga kerja non pertanian di kota yang lebih besar dibandingkan kesenjangan output antar sektor.

Sedangkan dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap distribusi pendapatan tenaga kerja menunjukkan pola yang sedikit berbeda dengan dengan dampak terhadap output sektoral, dimana kebijakan ekonomi yang paling efektif menurunkan kesenjangan pendapatan antar golongan tenaga kerja masih tetap pada kebijakan peningkatan investasi ke agroindustri prioritas yang dikombinasikan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian primer (Skenario 10). Berbeda dengan dampak terhadap distribusi output sektoral, kebijakan berikutnya yang efektif menurunkan kesenjangan pendapatan tenaga kerja adalah peningkatan ekspor agroindustri makanan yang dikombinasikan dengan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian primer (Skenario 5). Kebijakan lain yang juga menghasilkan penurunan indeks kesenjangan relatif besar adalah kebijakan tunggal peningkatan investasi di sektor agroindustri

Sama seperti dampak terhadap distribusi output sektoral, kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah, ekspor dan investasi yang ditujukan ke industri pengolahan makanan (Skenario 1, Skenario , Skenario 5 dan Skenario 7) akan menurunkan kesenjangan pendapatan tenaga kerja lebih besar dibandingkan bila kebijakan tersebut dialokasikan ke agroindustri non makanan. Kebijakan yang tidak menghasilkan pengaruh terhadap penurunan indeks kesenjangan adalah kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah ke agroindustri non makanan.

3.3. Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan Rumahtangga

3.3.1. Desa vs Kota

Indeks kesenjangan Theil-T Total pendapatan rumahtangga desa vs kota untuk Skenario Dasar sebesar 0.14591, lebih kecil dari indeks kesenjangan sektoral sebesar 0.31002. Artinya kesenjangan output antar sektor lebih lebar daripada kesenjangan pendapatan antar rumahtangga desa dan kota. Sedangkan besaran indeks Theil-T *between* (antar) kelompok desa vs kota adalah 0.02915 dan indeks Theil-T *within* (dalam) kelompok sebesar 0.11675 (Tabel 5). Dari besaran tersebut kesenjangan antar (*between*) kelompok rumahtangga (desa vs kota) memberikan kontribusi terhadap kesenjangan total yang terjadi sekitar 20% dan kesenjangan dalam (*within*) kelompok atau kesenjangan antar individu rumahtangga memberikan kontribusi terhadap kesenjangan total sekitar 80%. Apabila indeks kesenjangan

hasil analisis ini dibandingkan dengan indeks Theil-T untuk kesenjangan pendapatan rumahtangga desa vs kota tahun 1993 yang dianalisis oleh Akita (1999) sebesar 0.257, berarti selama sekitar 10 tahun indeks kesenjangan pendapatan rumahtangga desa vs kota mengalami penurunan sebesar 0.1111. Dalam hal ini indeks kesenjangan *between* kelompok sebesar 0.063 (24.5%) dan kesenjangan dalam kelompok sebesar 0.194 (75.4%). Sementara hasil analisis Akita untuk indeks kesenjangan yang sama tahun 1987 sebesar 0.241 sehingga dapat dikatakan selama masa Orde Baru, kesenjangan pendapatan antar rumahtangga desa vs kota justru mengalami peningkatan. Melalui analisis 3 titik waktu tersebut dapat ditunjukkan bahwa perkembangan distribusi pendapatan antar rumahtangga desa vs kota dalam dua titik waktu tahun 1993 ke tahun 2002 mengalami kecenderungan yang mengarah pada distribusi yang lebih merata.

Tabel 5: Dampak Kebijakan Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan Rumahtangga Desa vs Kota Tahun 2003

SIMULASI ¹	THEIL-T			THEIL-L		
	Total	Between	Within	Total	Between	Within
DASAR ²	0.14591	0.02915	0.11676	0.11459	0.02921	0.08538
Skenario 1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Skenario 2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Skenario 3	-0.00011	-0.00009	-0.00002	-0.00009	-0.00009	0.00000
Skenario 4	-0.00002	-0.00002	0.00000	-0.00002	-0.00002	0.00000
Skenario 5	-0.00013	-0.00011	-0.00003	-0.00011	-0.00011	0.00000
Skenario 6	-0.00002	-0.00002	0.00000	-0.00002	-0.00002	0.00000
Skenario 7	-0.00012	-0.00010	-0.00002	-0.00010	-0.00010	0.00000
Skenario 8	-0.00003	-0.00003	-0.00001	-0.00003	-0.00003	0.00000
Skenario 9	-0.00015	-0.00012	-0.00003	-0.00012	-0.00012	0.00000
Skenario 10	-0.00017	-0.00014	-0.00003	-0.00014	-0.00014	0.00000
Skenario 11	-0.00008	-0.00006	-0.00001	-0.00006	-0.00006	0.00000
Rata-rata	-0.00084	-0.00067	-0.00016	-0.00069	-0.00069	0.00000

¹ Nilai indeks Theil menurut Skenario adalah nilai **perubahan** antara indeks simulasi Dasar dengan indeks simulasi masing-masing Skenario.

² Nilai indeks Theil sebelum dilakukan simulasi kebijakan.

Dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri menyebabkan menurunnya kesenjangan terutama kesenjangan antar (*between*) kelompok. Secara rata-rata indeks kesenjangan total menurun sebesar 0.00012 dimana nilai perubahan tersebut hampir semuanya merupakan kontribusi dari penurunan indeks kesenjangan *between* kelompok. Perubahan kesenjangan yang hanya berdampak terhadap kesenjangan *between* kelompok tersebut karena perubahan kebijakan akan menghasilkan perubahan pendapatan antar kelompok dengan %tase berbeda sementara perubahan pendapatan antar rumahtangga di dalam masing-masing kelompok akan terjadi dengan %tase yang sama sehingga relatif tidak akan mempengaruhi distribusi pendapatan antar rumahtangga dalam kelompok tersebut.

Skenario kebijakan yang paling besar menurunkan indeks kesenjangan adalah kebijakan peningkatan investasi ke sektor agroindustri yang dialokasikan ke industri prioritas (Skenario 9) dan kombinasi kebijakan Skenario 9 dan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor primer (Skenario 10). Kebijakan lainnya, yaitu kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah, peningkatan ekspor dan pemberian insentif pajak juga berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan rumahtangga. Kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah ke sektor agroindustri makanan dan non makanan sebesar 10 % (Skenario 1 dan Skenario 2) tidak berpengaruh terhadap distribusi pendapatan rumahtangga.

Hasil analisis menunjukkan pula bahwa kebijakan ekonomi yang ditujukan ke agroindustri makanan (Skenario 3, Skenario 5 dan Skenario 7) akan jauh lebih efektif menurunkan kesenjangan pendapatan rumahtangga desa vs kota dibandingkan jika kebijakan yang sama ditujukan ke agroindustri non makanan. Hal ini disebabkan agroindustri makanan secara umum bersifat *labor intensif*, sehingga kebijakan meningkatkan investasi ataupun ekspor di sektor agroindustri makanan akan mengakibatkan peningkatan output. Peningkatan output akan mendorong permintaan faktor produksi tenaga kerja yang akan dipenuhi dari institusi rumahtangga. Dengan demikian kebijakan ekonomi di sektor agroindustri makanan tersebut akan efektif mempengaruhi distribusi pendapatan rumahtangga.

3.3.2. Pertanian vs Non Pertanian

Jika dibandingkan dengan distribusi pendapatan rumahtangga desa vs kota, distribusi pendapatan rumahtangga pertanian vs pertanian menunjukkan indeks kesenjangan yang lebih besar. Artinya kesenjangan pendapatan antara rumahtangga pertanian dan non pertanian lebih lebar dibandingkan dengan kesenjangan pendapatan rumahtangga secara spasial (desa vs kota). Indeks kesenjangan total menunjukkan angka 0.22372, lebih besar dibandingkan indeks kesenjangan pendapatan rumahtangga desa vs kota sebesar 0.14591. Indeks Theil-T *between* kelompok dalam hal ini bernilai 0.08587 atau memberikan kontribusi sekitar 38.4% dari kesenjangan total. Sedangkan berdasarkan indeks Theil-L nilai indeks kesenjangan total sebesar 0.20451 dengan kontribusi kesenjangan *between* kelompok sekitar 57% dan kesenjangan *within* kelompok sekitar 43% (Tabel 6).

abel 6 : Dampak Kebijakan Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan Rumahtangga Pertanian vs Non Pertanian Tahun 2003

SIMULASI ¹	THEIL-T			THEIL-L		
	Total	Between	Within	Total	Between	Within
DASAR ²	0.22372	0.08587	0.13785	0.20451	0.11646	0.08805
Skenario 1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Skenario 2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Skenario 3	-0.00008	-0.00007	-0.00001	-0.00013	-0.00013	0.00000
Skenario 4	-0.00002	-0.00002	0.00000	-0.00003	-0.00003	0.00000
Skenario 5	-0.00010	-0.00009	-0.00001	-0.00016	-0.00016	0.00000
Skenario 6	-0.00002	-0.00002	0.00000	-0.00004	-0.00004	0.00000
Skenario 7	-0.00010	-0.00008	-0.00001	-0.00015	-0.00015	0.00000
Skenario 8	-0.00003	-0.00003	0.00000	-0.00005	-0.00005	0.00000
Skenario 9	-0.00011	-0.00010	-0.00001	-0.00018	-0.00018	0.00000
Skenario 10	-0.00014	-0.00012	-0.00002	-0.00021	-0.00021	0.00000
Skenario 11	-0.00006	-0.00005	-0.00001	-0.00009	-0.00009	0.00000
Rata-rata	-0.00006	-0.00005	-0.00001	-0.00010	-0.00010	0.00000

¹ Nilai indeks Theil menurut Skenario adalah nilai **perubahan** antara indeks simulasi Dasar dengan indeks simulasi masing-masing Skenario.

² Nilai indeks Theil sebelum dilakukan simulasi kebijakan.

Dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri secara umum berhasil menurunkan kesenjangan pendapatan rumahtangga pertanian vs pertanian. Secara rata-rata penurunan indeks kesenjangan dari kedua belas kebijakan menghasilkan penurunan indeks kesenjangan 0.00012. Dibandingkan dengan kesenjangan pendapatan antara rumahtangga desa vs kota, dampak kebijakan terhadap penurunan indeks kesenjangan tersebut lebih kecil. Dengan demikian dalam kondisi distribusi pendapatan rumahtangga pertanian desa vs kota yang lebih timpang daripada distribusi pendapatan rumahtangga desa vs kota, kebijakan ekonomi yang ditujukan ke sektor agroindustri juga menghasilkan dampak penurunan kesenjangan yang lebih kecil.

Konsisten dengan dampak terhadap distribusi pendapatan rumahtangga desa vs kota, dari 11 Skenario kebijakan, kebijakan yang paling efektif menurunkan kesenjangan pendapatan rumahtangga pertanian vs non pertanian adalah peningkatan investasi ke agroindustri prioritas (Skenario 9) dan mengkombinasikan skenario kebijakan tersebut dengan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian primer (Skenario 10). Kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor agroindustri makanan dan non makanan (Skenario 1 dan Skenario 2) tidak mengubah distribusi pendapatan rumahtangga pertanian vs non pertanian. Kebijakan ekonomi lainnya, yaitu kebijakan peningkatan ekspor dan pemberian insentif pajak ke sektor agroindustri juga berhasil menurunkan kesenjangan pendapatan rumahtangga pertanian vs non pertanian.

Hasil analisis tersebut juga menunjukkan kebijakan peningkatan ekspor dan investasi yang ditujukan ke agroindustri makanan (Skenario 3, Skenario 5 dan Skenario 7) akan berdampak menurunkan kesenjangan pendapatan rumahtangga lebih besar dibandingkan bila kebijakan tersebut ditujukan ke agroindustri non makanan

IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan peran sektor agroindustri dalam meningkatkan output, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumahtangga golongan rendah, industri prioritas di sektor agroindustri adalah industri karet, industri kayu lapis, bambu dan rotan, industri rokok, industri minuman, dan industri pengolahan makanan sektor perikanan.
2. Distribusi pendapatan antar golongan tenaga kerja lebih merata (kesenjangan lebih kecil) dibandingkan dengan distribusi pendapatan sektoral. Distribusi pendapatan rumahtangga spasial (desa vs kota) lebih merata dibandingkan dengan distribusi pendapatan rumahtangga sektoral (pertanian vs non pertanian).
3. Kebijakan ekspor dan investasi di sektor agroindustri makanan akan berdampak lebih besar menurunkan kesenjangan pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumahtangga dibandingkan kebijakan di sektor agroindustri non makanan.
4. Kebijakan peningkatan ekspor dan investasi di sektor agroindustri akan berdampak lebih besar menurunkan kesenjangan pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumahtangga jika dialokasikan ke sektor agroindustri prioritas (industri karet, industri kayu lapis, bambu dan rotan, industri rokok, industri minuman, dan industri pengolahan makanan sektor perikanan).

4.2. Implikasi Kebijakan

1. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumahtangga, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan ekonomi yang dapat mendorong peningkatan ekspor dan investasi serta insentif pajak di sektor agroindustri.
2. Untuk meningkatkan efektifitas kebijakan ekspor, investasi dan insentif pajak, maka perlu difokuskan ke agroindustri prioritas, yaitu industri karet, industri kayu lapis, bambu dan rotan, industri rokok, industri minuman, dan industri pengolahan makanan sektor perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T., R.A. Lukman and Y. Yamada. 1999. Inequality in the Distribution of Household Expenditure in Indonesia: A Theil Decomposition Analysis. *The Developing Economies*, 37 (2) : 197-221.
- Arndt, H.W. 1987. *Pembangunan Ekonomi. Studi Tentang Sejarah Pemikiran*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
- BPS. 1998. *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1998*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS. 2006. *Statistik Industri Besar dan Sedang Indonesia 2004*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Chenery, H., Ahluwalia, Bell, Duloy and Jolly. 1974. *Redistribution with Growth*. Oxford University Press, Oxford.
- Delianov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia. 2005. *Kebijakan Pengembangan Industri Agro dan Kimia Tahun 2006*. Departemen Perindustrian, Jakarta.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gillis, M., D.H. Perkins, M. Romer and D.R. Snodgrass. 1987. *Economics of Development*. Second Edition. W.W. Norton & Company, New York.
- Herrick, B. and C.P. Kindleberger. 1988. *Economic Development*. McGraw-Hill International Book Company, Singapore.
- Hogendorn, J. S. 1992. *Economic Development*. Second Edition. Harper Collins Publishers Inc., New York.
- Kuznets, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45: 1-28.
- Lewis, W.A. 1954. *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. In Chenery, and Srinivasan (Editors). *Handbook of Development Economics*. Science Publisher B.V., Amsterdam.
- OECD. 2000. *Statistical Year Book: Central Government Debt 1980-1999*. Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.
- Robinson, S. and M. El-Said. 1997. *Estimating A Social Accounting Matrix Using Cross Entropy Difference Methods*. TMD Discussion Paper No. 21. IFPRI, Washington, D.C.
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Terjemahan. Erlangga, Jakarta